

**INDIKATOR SOSIAL  
KABUPATEN LEBONG  
TAHUN 2008**

**KATALOG BPS 4102010.1707**

**NOMOR 17070904**

**UKURAN BUKU 21 cm x 29 cm**

**JUMLAH HALAMAN ix + 63 halaman**

**NASKAH :**

**SEKSI STATISTIK SOSIAL**

**COVER :**

**SEKSI STATISTIK SOSIAL**

**DITERBITKAN OLEH :**

**BADAN PUSAT STATISTIK KABUPATEN LEBONG**

**DICETAK OLEH :**

**BADAN PUSAT STATISTIK KABUPATEN LEBONG**

## KATA PENGANTAR

Salah satu fungsi Badan Pusat Statistik (BPS) adalah penyebarluasan statistik melalui berbagai cara baik langsung maupun tidak langsung. Sehingga masyarakat yang peduli akan statistik secara langsung maupun tidak langsung dapat mengetahui perkembangan berbagai statistik di daerahnya. Penerbitan Indikator Sosial Kabupaten Lebong Tahun 2008 ini merupakan salah satu cara yang digunakan BPS Kabupaten Lebong untuk merealisasikan fungsi BPS tersebut.

Indikator Sosial Kabupaten Lebong Tahun 2008 merupakan analisis deskripsi sederhana dari berbagai indikator sosial yang ada di Kabupaten Lebong. Indikator-indikator sosial yang disajikan meliputi bidang kependudukan, kesehatan dan gizi, pendidikan, ketenagakerjaan dan sosial lainnya.

Penerbitan publikasi ini merupakan penerbitan yang pertama kali, sehingga kami sangat menyadari bahwa publikasi ini masih mengandung banyak kekurangan dan kelemahan, terutama yang berkaitan dengan teknik penulisan, teknik analisis, maupun tampilannya. Demi sempurnanya publikasi ini pada penerbitan tahun berikutnya, kami mengharapkan saran dan kritik membangun dari berbagai pihak.

Tubei, November 2009  
BPS Kabupaten Lebong  
Kepala,

Novrizal, SE  
NIP. 196611021992121001

## DAFTAR ISI

	Halaman
Halaman Judul	i
Halaman Sub Judul	ii
Kata Pengantar	iii
Daftar Isi	iv
Daftar Tabel	vi
Daftar Gambar	viii
Bab I Pendahuluan	1
Bab II Kependudukan	7
2.1 Kepadatan Penduduk	8
2.2 Pertumbuhan Penduduk	9
2.3 Angka Beban Ketergantungan	10
2.4 Rasio Jenis Kelamin	13
Bab III Kesehatan dan Gizi	15
3.1 Jumlah Puskesmas	16
3.2 Penolong Kelahiran	17
3.3 Persentase Balita Mendapat ASI	20
3.4 Imunisasi	21
Bab IV Pendidikan	23
4.1 Partisipasi Sekolah	25
4.2 Persentase Melek Huruf (PMH)	26
4.3 Rasio Murid-Guru (RMG)	27
4.4 Rasio Murid-Sekolah (RMS)	29
4.5 Partusipasi Sekolah	30
4.6 Ijazah Tertinggi	31

Bab V Ketenagakerjaan	33
5.1 Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)	34
5.2 Komposisi Penduduk yang Bekerja Menurut Lapangan Usaha	35
5.3 Komposisi Penduduk yang Bekerja Menurut Status Pekerjaan	37
Bab VI Sosial Lainnya	39
6.1 Status Perkawinan	40
6.2 Penggunaan/ Pemakaian Alat/ Cara KB	42
6.3 Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	44
TABEL-TABEL	47

<http://lebongkab.bps.go.id>

## DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 2.1 Luas Wilayah Menurut Kecamatan di Kabupaten Lebong Tahun 2008	48
Tabel 2.2 Jumlah Penduduk Menurut Kecamatan di Kabupaten Lebong Tahun 2007	49
Tabel 2.3 Jumlah Penduduk, Luas Daerah dan Kepadatan Penduduk di Kabupaten Lebong Tahun 2007-2008	50
Tabel 2.4 Persentase Penduduk Menurut Jenis Kelamin dan Kelompok Umur di Kabupaten Lebong Tahun 2008	51
Tabel 2.5 Angka Beban Tanggungan Penduduk Menurut Jenis Kelamin dan Kelompok Umur di Kabupaten Lebong Tahun 2008	52
Tabel 2.6 Persentase Penduduk Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin di Kabupaten Lebong Tahun 2008	53
Tabel 3.1 Jumlah Puskesmas Menurut Jenis dan Kecamatan di Kabupaten Lebong Tahun 2008	54
Tabel 3.2 Persentase Balita Menurut Penolong Kelahiran Pertama dan Terakhir di Kabupaten Lebong Tahun 2008	55
Tabel 3.3 Persentase Balita 2-4 Tahun yang Pernah Disusui Menurut Lamanya Disusui di Kabupaten Lebong Tahun 2008	56
Tabel 3.4 Persentase Balita 2-4 Tahun yang Pernah Mendapat Imunisasi Menurut Jenis Imunisasi di Kabupaten Lebong Tahun 2008	57
Tabel 4.1 Persentase Penduduk Berumur 10 Tahun ke Atas Menurut Status Pendidikan dan Jenis Kelamin di Kabupaten Lebong Tahun 2008	58
Tabel 4.2 Rasio Murid-Guru di Kabupaten Lebong Tahun 2007-2008	59

Tabel 4.3	Rasio Murid-Kelas di Kabupaten Lebong Tahun 2007-2008	60
Tabel 4.4	Persentase Penduduk Usia Sekolah Menurut Kelompok Umur dan Partisipasi Sekolah di Kabupaten Lebong tahun 2008	61
Tabel 4.5	Persentase Penduduk Umur 10 Tahun ke Atas Menurut Tingkat Pendidikan yang Ditamatkan dan Klasifikasi Daerah di Kabupaten Lebong Tahun 2008	62
Tabel 6.1	Persentase Penduduk Berumur 10 Tahun ke Atas Menurut Status Perkawinan di Kabupaten Lebong Tahun 2008	63

<http://lebongkab.bps.go.id>

## DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 1 Persentase Luas Wilayah Menurut Kecamatan di Kabupaten Lebong Tahun 2008	9
Gambar 2 Persentase Penduduk Menurut Kelompok Umur Muda, Produktif, dan Tua di Kabupaten Lebong Tahun 2008	11
Gambar 3 Persentase Penduduk Menurut Jenis Kelamin di Kabupaten Lebong Tahun 2008	15
Gambar 4 Persentase Balita Menurut Penolong Kelahiran Pertama di Kabupaten Lebong Tahun 2008	19
Gambar 5 Persentase Balita Menurut Penolong Kelahiran Terakhir di Kabupaten Lebong Tahun 2008	20
Gambar 6 Persentase Balita Umur 2-4 Tahun Menurut Pernah Tidaknya Diberi ASI di Kabupaten Lebong Tahun 2008	21
Gambar 7 Persentase Balita Berumur 2-4 Tahun yang Pernah Disusui Menurut Lamanya Disusui di Kabupaten Lebong Tahun 2008	21
Gambar 8 Persentase Penduduk Berumur 10 Tahun ke Atas Menurut Status Pendidikan di Kabupaten Lebong Tahun 2008	26
Gambar 9 Persentase Penduduk Berumur 10 Tahun ke Atas Menurut Ijazah Tertinggi yang Dimiliki di Kabupaten Lebong Tahun 2008	32
Gambar 10 Komposisi Penduduk Berumur 10 Tahun ke Atas yang Bekerja Menurut Lapangan Pekerjaan di Kabupaten Lebong Tahun 2008	36
Gambar 11 Komposisi Penduduk Berumur 10 Tahun ke Atas yang Bekerja Menurut Status Pekerjaan di Kabupaten Lebong Tahun 2008	37

Gambar 12 Persentase Penduduk Berumur 10 Tahun ke Atas Menurut Status Perkawinan di Kabupaten Lebong Tahun 2008	40
Gambar 13 Persentase Balita Menurut Kepemilikan Akte Kelahiran di Kabupaten Lebong Tahun 2008	42
Gambar 14 Persentase Balita Berdasarkan Alasan Tidak Memiliki Akte Kelahiran di Kabupaten Lebong Tahun 2008	43

<http://lebongkab.bps.go.id>



# BAB I

# PENDAHULUAN

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

Pada hakekatnya pembangunan merupakan usaha untuk meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat. Sejak semula telah disadari bahwa pembangunan bukanlah hal yang mudah dan pembangunan mencakup segi-segi yang luas dan multi dimensi. Proses pembangunan semacam ini merupakan suatu usaha jangka panjang yang memerlukan data penunjang untuk setiap tahap dan bidangnya. Oleh karena kebutuhan yang sifatnya terus-menerus dan dalam segala bidang itulah usaha pembangunan juga dibarengi juga dengan kebutuhan untuk setiap saat menyempurnakan dan mengembangkan data statistik yang ada. Pengukuran hasil-hasil pembangunan pun menjadi beraneka ragam. Segala macam data dikumpulkan, baik sebagai data dasar maupun sebagai indikator untuk menyusun dan mengevaluasi kebijakan dan program.

Data statistik yang andal merupakan kebutuhan untuk bahan penyusunan kebijakan dan program serta evaluasinya. Berbagai negara dalam menyiapkan rencana kegiatan untuk melaksanakan pembangunan memberikan prioritas terhadap masalah pengumpulan data dan pengembangan data statistik yang berkaitan dengan bidang-bidang pembangunan. Pada masa itu dikenal indikator ekonomi, yang di Indonesia banyak dipakai untuk mengukur situasi ekonomi atau situasi pembangunan.

Pada saat yang sama, di tengah banyaknya data demografi, sosial dan ekonomi di tiap-tiap negara tadi, indikator sosial yang akan menguji, menerangkan dan membandingkan hasil-hasil pembangunan belum tersedia. Lebih khusus lagi pembangunan di Indonesia adalah pembangunan manusia Indonesia seutuhnya maka indikator yang diperlukan bukan hanya indikator ekonomi tetapi termasuk juga indikator sosial.

Tim Perumus Penyempurnaan Indikator Sosial (BPS, 1998) mendefinisikan indikator sosial sebagai berikut “Indikator sosial adalah ringkasan dari serangkaian data statistik sosial yang diturunkan dan disusun untuk menggambarkan suatu keadaan atau kecenderungan keadaan-keadaan sosial yang menjadi atau akan menjadi pokok perhatian atau usaha pembangunan masyarakat”. Tanpa bermaksud mengurangi ketepatan definisi tersebut, dapat dikatakan bahwa indikator sosial adalah suatu konsepsi, yang didasarkan pada suatu observasi dan biasanya kuantitatif, yang menyatakan sesuatu tentang aspek kehidupan sosial yang perlu mendapat perhatian atau tentang perubahan yang terjadi dalam kehidupan sosial tersebut.

Jika definisi yang telah disalin tadi menjadi rujukan, tidak terlalu sulit untuk menjawab mengapa indikator sosial itu diperlukan (United Nations, 1975). Pertama, indikator sosial dapat menggambarkan posisi atau perubahan yang sedang terjadi dalam bidang sosial. Kedua, indikator sosial dapat menerangkan mengapa telah terjadi perubahan kehidupan atau gejala

sosial. Ketiga, indikator sosial dapat menunjukkan perlu tidaknya suatu program pengembangan untuk memperbaiki kondisi sosial dievaluasi setelah adanya kebijaksanaan tentang pengembangan tersebut.

Ada minimal 3 (tiga) kegunaan indikator sosial, yaitu:

1. Untuk penyusunan formulasi dan evaluasi kebijaksanaan.

Program evaluasi adalah suatu pekerjaan yang sifatnya khusus dan kompleks, memerlukan riset yang mendalam dan berulang, khususnya untuk mengidentifikasi efek dari berbagai faktor yang sulit diduga. Dalam kondisi seperti ini sangat diperlukan berbagai indikator sosial, disamping berbagai data statistik lainnya yang relevan.

2. Untuk mengukur kondisi sosial dan perubahan sosial.

Penggunaan indikator sosial yang paling luas adalah untuk mengukur kondisi sosial dan perubahan sosial ini. Kondisi dan perubahan sosial mencakup struktur sosial, proses dan perilaku sosial.

3. Untuk penyusunan laporan sosial dan neraca sosial.

Penggunaan indikator sosial di sini lebih diarahkan pada analisis, interpretasi, penarikan kesimpulan untuk menentukan kebijaksanaan, penilaian terhadap beberapa aspek kehidupan masyarakat yang mudah dipahami dan dikomunikasikan kepada orang awam maupun para pengambil keputusan.

Publikasi ini merupakan bagian dari usaha untuk ikut mengembangkan indikator sosial sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Badan Pusat Statistik sebagai penyedia data untuk pembangunan. Dalam rangka untuk menyampaikan berbagai informasi yang lengkap tentang kondisi sosial di Kabupaten Lebong pada tahun 2008 ini Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Lebong bekerjasama dengan Bapedda Kabupaten Lebong menerbitkan publikasi Indikator Sosial Kabupaten Lebong Tahun 2008.

Publikasi ini terdiri dari 6 bab yang berisikan uraian atau analisis deskripsi sederhana dari indikator-indikator sosial. Analisis dilakukan dengan menggunakan grafik. Pendekatan yang digunakan dalam publikasi ini adalah mengadopsi indikator-indikator di berbagai bidang yang sudah secara rutin dilaporkan seperti kependudukan, kesehatan dan gizi, pendidikan, ketenagakerjaan dan sosial lainnya. Indikator-indikator sosial tersebut merupakan pelengkap indikator ekonomi dan diharapkan mampu menggambarkan fenomena sosial yang sedang terjadi. Di samping itu keterbandingan tahapan pencapaian pembangunan antar waktu/periode dapat pula dicerminkan oleh indikator-indikator tersebut sehingga pada gilirannya gambaran tentang pencapaian suatu tahap pembangunan di bidang sosial dapat diperoleh. Dengan diperlukannya indikator sosial seperti yang telah disebut sebelumnya, publikasi ini mengandung maksud

untuk menyajikan indikator yang menggambarkan situasi dan kondisi sosial di Kabupaten Lebong Tahun 2008.

<http://lebongkab.bps.go.id>

<http://lebo.kab.bps.go.id>

# BAB II

# KEPENDUDUKAN

## **BAB II**

### **KEPENDUDUKAN**

Penduduk adalah kekayaan yang paling berharga bagi suatu negara. Faktor Sumber Daya Manusia (SDM) telah diakui sebagai faktor yang paling berperan dalam setiap aspek pembangunan. Perkembangan dan kemajuan suatu daerah pada akhirnya juga akan sangat dipengaruhi oleh bagaimana kondisi dan kualitas penduduknya. Pembangunan pada suatu daerah sangat diharapkan untuk dapat tepat sasaran dan memperhatikan skala prioritas dari setiap tahapnya. Selain itu pembangunan yang dilaksanakan pemerintah tersebut harus dapat memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi seluruh penduduk daerah tersebut. Agar memperoleh gambaran yang tepat tentang kondisi kependudukan, maka diperlukan data mengenai penduduk sebagai indikator sosial. Di dalam bab II ini, akan digambarkan kondisi kependudukan di wilayah Kabupaten Lebong secara umum.

#### **2.1. Kepadatan Penduduk**

Luas wilayah Kabupaten Lebong adalah lebih kurang 192.924 Ha atau 1.929,24 kilometer persegi. Ditinjau dari letak geografisnya Kabupaten Lebong terletak pada 105° sampai dengan 108° Bujur Timur dan 02°,65' sampai dengan 03°,60' Lintang Selatan di sepanjang Bukit Barisan.



Kabupaten Lebong terdiri dari 13 kecamatan, yaitu Kecamatan Rimbo Pengadang, Kecamatan Topos, Kecamatan Lebong Selatan, Kecamatan Bingin Kuning, Kecamatan Lebong Tengah, Kecamatan Lebong Sakti, Kecamatan Lebong Atas, Kecamatan Pelabai, Kecamatan Lebong Utara, Kecamatan Amen, Kecamatan Uram Jaya, Kecamatan Pinang Belapis dan Kecamatan Padang Bano.

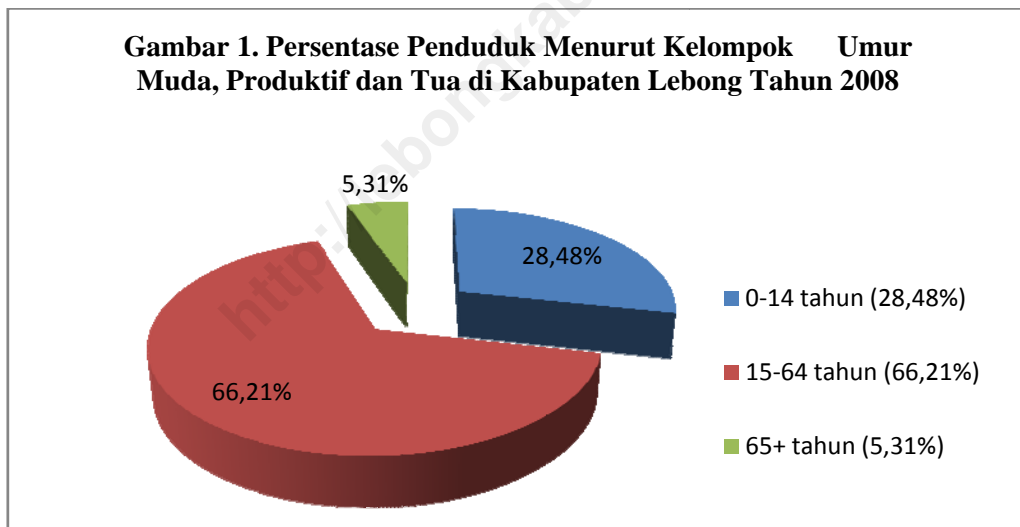
Berdasarkan data SUPAS (Survei Penduduk Antar Sensus), jumlah penduduk Kabupaten Lebong pada pertengahan tahun 2008 adalah sebanyak 91.142 jiwa. Dengan luas wilayah sebesar 1.929,24 kilometer persegi, maka kepadatan penduduk di Kabupaten Lebong pada pertengahan tahun 2008 adalah sebesar 47 jiwa/kilometer persegi. Angka tersebut mengungkapkan bahwa pada setiap satu kilometer persegi di Kabupaten Lebong didiami oleh lebih kurang 47 orang penduduk. Terlihat bahwa, dibandingkan dengan luas wilayahnya, penduduk di Kabupaten Lebong masih tergolong jarang.

## **2.2. Pertumbuhan Penduduk**

Pertumbuhan penduduk merupakan keseimbangan yang dinamis antara kekuatan-kekuatan yang menambah dan kekuatan-kekuatan yang mengurangi banyaknya penduduk. Pertumbuhan penduduk dipengaruhi oleh tiga faktor, yaitu kelahiran, kematian dan migrasi.

Pertumbuhan penduduk Kabupaten Lebong pada kurun waktu dua tahun terakhir yaitu tahun 2007 dan 2008 menunjukkan nilai yang positif. Pada pertengahan tahun 2007 jumlah penduduk Kabupaten Lebong adalah sebesar 89.690 jiwa, sedangkan pada pertengahan tahun 2008 jumlah penduduk Kabupaten Lebong meningkat menjadi 91.142 jiwa. Berarti dalam kurun waktu satu tahun telah terjadi peningkatan jumlah penduduk sebesar 1.452 jiwa, atau jika dihitung nilai persentasenya adalah sebesar 1,62 persen.

### 2.3. Angka Beban Ketergantungan



Pada tahun 2008 jumlah penduduk usia muda (kurang dari 15 tahun) di Kabupaten Lebong lebih banyak dibandingkan jumlah penduduk usia tua (65 tahun ke atas). Jumlah penduduk usia muda adalah sebesar 28,48 persen dari keseluruhan penduduk Lebong, sedangkan jumlah penduduk usia tua

adalah sebesar 5,31 persen saja. Secara keseluruhan persentase penduduk usia muda dan usia tua di Kabupaten Lebong pada tahun 2008 adalah sebanyak 33,79 persen. Relatif tingginya angka persentase penduduk usia tua dan muda tersebut menggambarkan bahwa angka beban ketergantungan di Kabupaten Lebong pada tahun 2008 relatif tinggi.

Dampak keberhasilan dari pembangunan di bidang kependudukan diantaranya terlihat pada perubahan komposisi penduduk menurut umur yang tercermin dengan semakin rendahnya Angka Beban Ketergantungan. Angka Beban Ketergantungan mencerminkan beban tanggungan ekonomi penduduk kelompok usia produktif (15-64 tahun) terhadap penduduk kelompok usia tidak produktif. Penduduk usia tidak produktif adalah penduduk kelompok usia muda (kurang dari 15 tahun) dan usia tua (65 tahun ke atas). Semakin tingginya angka beban ketergantungan menunjukkan semakin berat beban penduduk usia produktif dalam menanggung penduduk usia tidak produktif dan sebaliknya jika nilainya semakin kecil, maka semakin ringan beban yang ditanggung. Semakin kecilnya angka beban ketergantungan akan memberikan kesempatan bagi penduduk usia produktif untuk meningkatkan kualitas dirinya.

Angka Beban Ketergantungan dapat juga disebut dengan Rasio Ketergantungan atau *Dependency Ratio*. Selain *Dependency Ratio* juga dikenal ukuran lain yang dapat menggambarkan angka beban ketergantungan yang lebih spesifik, yaitu Rasio Ketergantungan Anak atau

*Child Dependency Ratio* dan Rasio Ketergantungan Lanjut Usia atau *Old Dependency Ratio*.

*Dependency Ratio (DR)* adalah perbandingan antara jumlah penduduk usia di bawah 15 tahun dan penduduk usia 65 tahun ke atas dengan jumlah penduduk usia 15-64 tahun di suatu daerah pada waktu tertentu. Indikator ini berguna untuk menunjukkan total rasio ketergantungan penduduk usia tidak produktif bagi penduduk usia produktif. *Child Dependency Ratio (CDR)* adalah perbandingan antara jumlah penduduk usia 0-14 tahun dengan jumlah penduduk usia 15-64 tahun di suatu daerah pada waktu tertentu, dan biasanya dinyatakan sebagai jumlah anak per 100 penduduk usia produktif. Indikator ini berguna untuk menunjukkan besarnya beban tanggungan anak bagi penduduk usia produktif. *Old Dependency Ratio (ODR)* adalah perbandingan antara jumlah penduduk usia 65 tahun ke atas dengan jumlah penduduk usia 15-64 tahun di suatu daerah pada waktu tertentu, dan biasanya dinyatakan sebagai jumlah penduduk lanjut usia per 100 penduduk usia produktif. Indikator ini berguna untuk menggambarkan besarnya beban tanggungan penduduk lanjut usia bagi penduduk usia produktif.

Pada tahun 2008 nilai *DR* di kabupaten Lebong adalah sebesar 51,03 persen. Pengertiannya adalah diantara 100 orang penduduk usia produktif menanggung 51 orang usia tidak produktif. Bila dikaji lebih mendalam maka beban tanggungan penduduk usia produktif yang paling dominan

adalah pada penduduk usia muda. Angka beban tanggungan penduduk usia produktif terhadap penduduk usia muda atau *CDR* di Kabupaten Lebong pada tahun 2008 adalah sebesar 43,01 persen, sedangkan beban tanggungannya terhadap penduduk usia tua atau *ODR* adalah sebesar 8,01 persen.

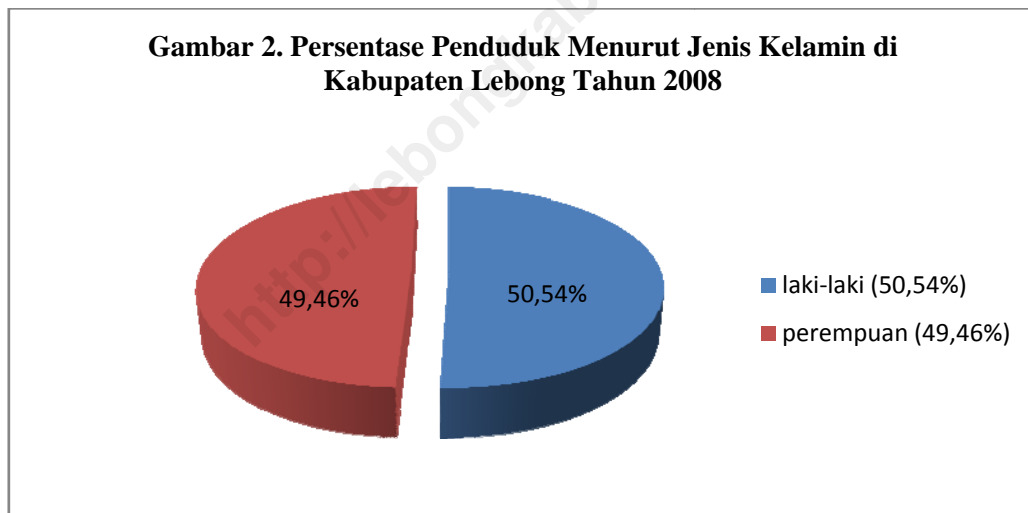
Dibandingkan dengan tahun 2007 angka beban ketergantungan di Kabupaten Lebong mengalami pengurangan. Pengurangan angka beban ketergantungan pada kurun waktu 2007 ke 2008 didorong oleh semakin rendahnya angka beban ketergantungan penduduk usia muda maupun penduduk usia tua. Angka *DR* pada tahun 2007 adalah 55,99 persen. Sedangkan angka *CDR* dan *ODR* pada tahun 2007 masing-masing sebesar 46,68 persen dan 9,31 persen. Pengurangan ini juga dapat mengindikasikan bahwa di Kabupaten Lebong peningkatan jumlah penduduk usia tidak produktif relatif lebih sedikit dibandingkan peningkatan penduduk usia produktif.

#### **2.4. Rasio Jenis Kelamin**

Rasio Jenis Kelamin sebagai suatu perbandingan antara penduduk laki-laki dengan penduduk perempuan merupakan salah satu indikator keseimbangan gender dalam kuantitas. Rasio jenis kelamin memperlihatkan banyaknya penduduk laki-laki per 100 penduduk perempuan. Bila rasio jenis kelamin berada di atas angka 100 persen berarti lebih banyak

penduduk laki-laki dibanding penduduk perempuan, sedangkan bila rasio jenis kelamin berada di bawah angka 100 persen maka dapat dikatakan bahwa penduduk perempuan lebih banyak dari penduduk laki-laki.

Pada tahun 2008 di Kabupaten Lebong nilai rasio jenis kelaminnya adalah sebesar 102,18 yang berarti terdapat 102 penduduk laki-laki berbanding 100 penduduk perempuan. Hal ini dapat disebabkan oleh beberapa faktor yaitu tingkat kelahiran laki-laki lebih tinggi, tingkat kematian laki-laki yang rendah atau bisa jadi karena migrasi masuk penduduk laki-laki lebih besar dibanding penduduk perempuan.



<http://lebotan.kab.bps.go.id>

# BAB III

# KESEHATAN

# DAN

# GIZI

## **BAB III**

### **KESEHATAN DAN GIZI**

Arah kebijakan pembangunan kesehatan adalah meningkatkan kualitas sumber daya manusia, kualitas hidup dan usia harapan hidup penduduk. Secara implisit arah kebijakan pembangunan kesehatan itu menyatakan bahwa penduduk yang sehat merupakan salah satu modal dasar dalam pembangunan, sehingga peranannya sangat penting dalam menunjang keberhasilan pembangunan nasional.

Penduduk yang sehat memiliki potensi atau kemampuan untuk meningkatkan produktivitasnya. Peningkatan produktivitas berarti akan meningkatkan nilai tambah ekonomi atau meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Oleh karena itu peningkatan kualitas kesehatan penduduk memegang peranan penting dalam memacu pertumbuhan ekonomi. Peningkatan kualitas kesehatan penduduk dapat optimal jika didukung oleh tersedianya sarana dan prasarana kesehatan yang memadai, dan diimbangi tersedianya tenaga medis yang berkualitas dan memadai.

#### **3.1. Jumlah Puskesmas**

Jumlah Puskesmas di setiap kecamatan berdasarkan jenisnya merupakan salah satu indikator penting yang bisa menggambarkan bagaimana ketersediaan fasilitas kesehatan masyarakat di daerah tersebut.



Dengan adanya data mengenai jumlah Puskesmas ini, dapat diperoleh masukan yang bermanfaat bagi pembuatan kebijakan di bidang kesehatan dan kependudukan.

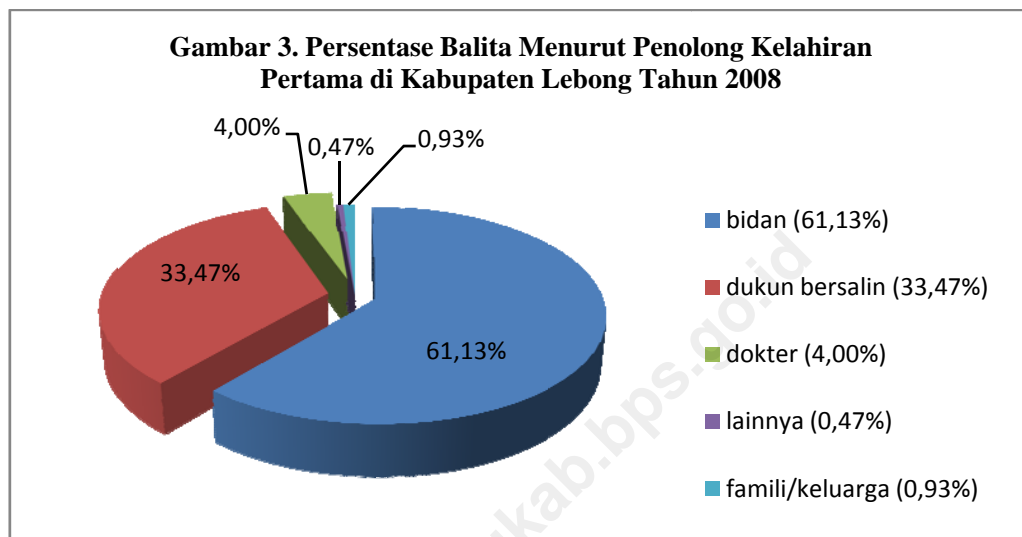
Pada tahun 2008 di Kabupaten Lebong terdapat 11 Puskesmas, 31 Puskesmas Pembantu (PUSTU) dan 12 buah Puskesmas Keliling yang kesemuanya tersebar di 13 Kecamatan yang ada di Kabupaten Lebong. Jumlah fasilitas Puskesmas terbanyak berada di Kecamatan Lebong Utara dengan total keseluruhan jumlah yaitu 18 buah fasilitas. Sedangkan jumlah Puskesmas paling minim berada di Kecamatan Rimbo Pengadang dengan jumlah fasilitas puskesmas hanya sebanyak 7 buah saja.

### **3.2. Penolong Kelahiran**

Penolong pada saat kelahiran dapat memberikan gambaran tentang tingkat kesadaran masyarakat akan pentingnya pertolongan medis, selain itu secara tidak langsung juga dapat menggambarkan bagaimana kondisi ekonomi masyarakat di Kabupaten Lebong. Penolong pada saat kelahiran ini dikelompokkan menjadi dua jenis yaitu penolong kelahiran pertama dan penolong kelahiran terakhir.

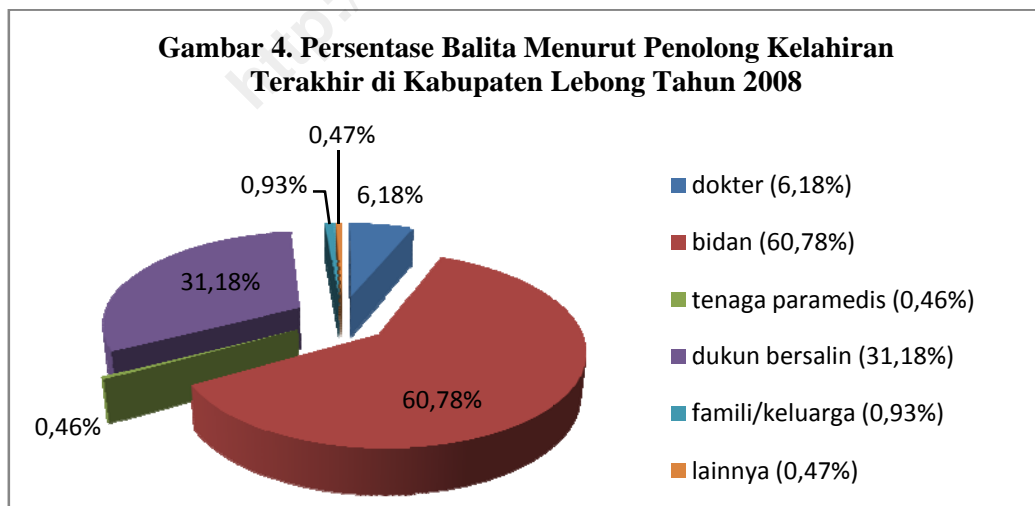
Pada tahun 2008 di Kabupaten Lebong persentase penolong kelahiran pertama yang terbanyak pada balita adalah bidan dengan nilai sebesar 61,13 persen, selain itu balita dengan penolong pertama dukun juga menunjukkan nilai yang cukup besar yaitu 33,47 persen. Untuk balita

dengan penolong kelahiran yang lain besarnya tidak signifikan yaitu hanya sebesar 4,00 persen untuk dokter, 0,93 persen untuk famili/keluarga dan 0,47 persen untuk lainnya.

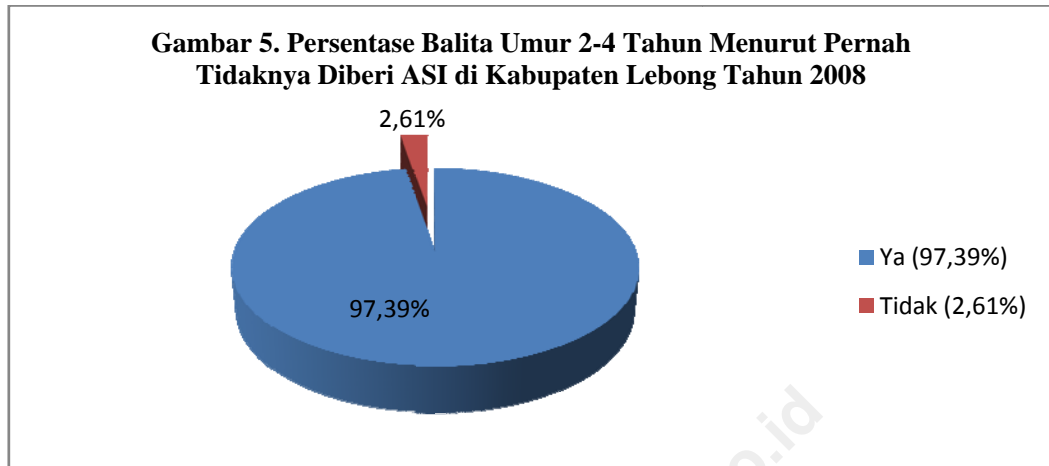


Di lain sisi, ternyata untuk persentase balita menurut penolong kelahiran terakhir di Kabupaten Lebong Tahun 2008 keadaannya tidak jauh berbeda dengan penolong kelahiran pertama. Persentase penolong kelahiran terakhir terbesar adalah dibantu oleh tenaga bidan dengan nilai persentase sebesar 60,78 persen, sedangkan angka persentase terkecil dibantu oleh tenaga paramedis yaitu sebesar 0,46 persen. Sementara itu persentase penolong kelahiran oleh tenaga dokter, dukun bersalin, famili/keluarga dan tenaga lainnya adalah masing-masing sebesar 6,18 persen, 31,18 persen, 0,93 persen dan 0,47 persen. Dari data juga dapat terlihat bahwa persentase balita yang ditolong oleh bidan dan dukun bersalin mengalami penurunan

masing-masing sebesar 0,35 persen dan 2,29 persen. Kemungkinan besar penurunan persentase tersebut memberikan sumbangan terhadap kenaikan nilai persentase pada penolong kelahiran terakhir oleh dokter yaitu sebesar 6,18 persen. Hal ini mengindikasikan bahwa kesadaran masyarakat akan pentingnya bantuan tenaga medis pada saat persalinan sudah cukup baik. Karena proses pemotongan tali pusar dan termasuk pemberian obat melalui suntikan terjadi pada saat pertolongan kelahiran terakhir ini. Hal lain yang cukup menarik adalah persentase penolong kelahiran oleh famili/keluarga dan tenaga lain besarnya tidak mengalami perubahan. Untuk kelompok masyarakat tertentu ternyata masih menaruh kepercayaan yang cukup besar terhadap famili/keluarga dan tenaga lainnya untuk melakukan pertolongan pada persalinan sejak awal sampai selesai.



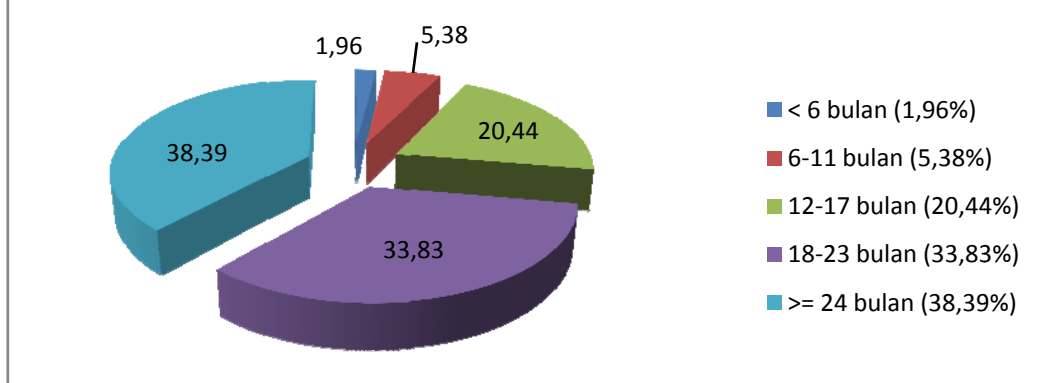
### 3.3. Persentase Balita Mendapat ASI



Berdasarkan pernah tidaknya diberi ASI, pada tahun 2008 di Kabupaten Lebong dapat dikategorikan menjadi dua kelompok yaitu pernah dan tidak pernah. Persentase balita yang pernah diberi ASI memiliki jumlah yang cukup besar yaitu sebanyak 97,39 persen. Sedangkan balita yang tidak diberi ASI memiliki persentase yang kecil, hanya sebesar 2,61 persen.

Hal ini cukup mencerminkan kesadaran penduduk tentang pentingnya pemberian ASI bagi balita. Walaupun untuk kesimpulan yang lebih dalam harus dilihat lagi data tentang lamanya pemberian ASI pada balita.

**Gambar 6. Persentase Balita berumur 2-4 Tahun yang Pernah Disusui Menurut Lamanya Disusui di Kabupaten Lebong Tahun 2008**



Berdasarkan lamanya diberi ASI, balita berumur 2-4 tahun dapat dikelompokkan menjadi lima kelompok yaitu kurang dari enam bulan, 6-11 bulan, 12-17 bulan, 18-23 bulan, dan lebih dari 24 bulan. Persentase terbesar terdapat pada kelompok umur lebih dari 24 bulan yaitu sebesar 38,39 persen, sedangkan persentase terkecil terdapat pada kelompok umur kurang dari enam bulan yaitu sebesar 1,96 persen.

### 3.4. Imunisasi

Untuk pencegahan penyakit, kematian dan kecacatan pada balita, dilakukan program imunisasi. Sejak tahun 1982, pemerintah telah mengusahakan pemberian 5 jenis imunisasi yaitu BCG (pencegah TBC), DPT (pencegah difteri, pertusis dan tetanus), polio (pencegah polio), campak (pencegah campak) dan Hepatitis B kepada balita.

Dari data Susenas Kor Tahun 2008, diketahui bahwa di Kabupaten Lebong persentase balita yang belum pernah diimunisasi sama sekali hanya 5,52 persen saja, sedangkan persentase balita pernah mendapatkan imunisasi adalah 94,48 persen. Jika dianalisis lebih jauh berdasarkan jenisnya, maka untuk balita yang pernah diberi imunisasi persentase pemberian imunisasi BCG adalah yang paling tinggi yaitu sebesar 93,57 persen. Sedangkan persentase pemberian imunisasi paling rendah adalah pada imunisasi campak yaitu sebesar 79,67 persen.

<http://lebongkab.bps.go.id>

<http://lebo.kab.bps.go.id>

# BAB IV

# PENDIDIKAN

## **BAB IV**

### **PENDIDIKAN**

Pendidikan merupakan proses pemberdayaan peserta didik sebagai subyek sekaligus obyek dalam membangun kehidupan yang lebih baik. Mengingat pendidikan sangat berperan penting sebagai faktor utama dalam meningkatkan sumber daya manusia maka permasalahan pendidikan ini harus mendapat perhatian yang lebih. Untuk mewujudkan pendidikan yang berkualitas bagi masyarakat, berbagai upaya dilakukan pemerintah, misalnya dengan meningkatkan sarana dan prasarana pendidikan, perbaikan kurikulum, bahkan sejak tahun 1994 pemerintah juga telah melaksanakan program wajib belajar 9 tahun dan sampai saat ini masih terus melanjutkan program wajib belajar 6 tahun. Dengan semakin lamanya usia belajar ini diharapkan tingkat pendidikan anak semakin membaik, dan tentunya akan berpengaruh pada tingkat kesejahteraan penduduk.

Kesuksesan program wajib belajar baik di jenjang pendidikan dasar maupun pendidikan menengah tergantung dari ketersediaan fasilitas pendidikan dan kemudahan dalam mengakses fasilitas pendidikan. Semakin lengkap fasilitas pendidikan yang dimiliki dan semakin mudah mengakses fasilitas pendidikan maka kualitas sumber daya manusia di daerah tersebut akan lebih baik.



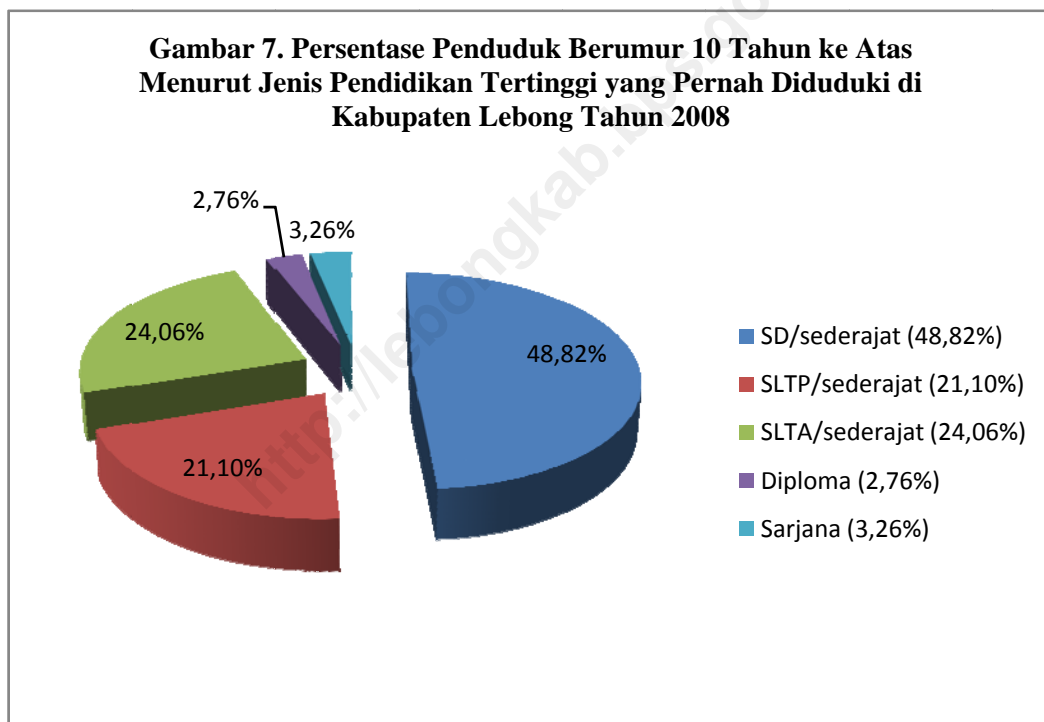
Faktor lain yang cukup penting adalah tersedianya jumlah guru dengan rasio yang ideal. Artinya guru tidak dibebani tanggung jawab mengajar dalam jumlah kelas maupun jumlah murid yang melebihi batas kemampuan idealnya, sehingga proses belajar mengajar dapat berjalan dengan lancar dan maksimal. Selain itu kepadatan murid dalam kelas yang ditunjukkan dari rasio murid terhadap kelas juga dapat mempengaruhi kelancaran proses belajar mengajar. Keberhasilan program wajib belajar dan kualitas pendidikan sumber daya manusia dapat diukur dari jumlah sekolah, angka melek huruf, partisipasi sekolah, rasio murid terhadap guru, rasio murid terhadap kelas, dan lain-lain.

#### **4.1. Partisipasi Sekolah**

Partisipasi Sekolah dapat menunjukkan keadaan sumber daya manusia dan kondisi umum sektor pendidikan di suatu daerah. Pada tahun 2008 di Kabupaten Lebong, penduduk yang berumur 10 tahun ke atas dengan partisipasi sekolah tidak atau belum pernah bersekolah adalah sebesar 2,51 persen, penduduk yang berumur 10 tahun ke atas yang masih bersekolah sebesar 20,09 persen dan penduduk yang berumur 10 tahun ke atas yang tidak bersekolah lagi adalah sebesar 77,40 persen.

Berdasarkan data Susenas Kor Tahun 2008 maka penduduk yang berumur 10 tahun ke atas yang masih bersekolah dan tidak bersekolah lagi dapat dikelompokkan lagi berdasarkan jenis pendidikan tertinggi yang

pernah diduduki. Hasilnya adalah penduduk 10 tahun ke atas dengan jenis pendidikan tertinggi yang pernah diduduki SD/ sederajat memiliki persentase paling besar yaitu 48,82 persen. Pada jenjang SLTP/ sederajat memiliki persentase 21,10 persen, jenjang SLTA/ sederajat memiliki persentase 24,06 persen, penduduk dengan jenis pendidikan tertinggi Diploma memiliki persentase 2,76 persen dan untuk jenjang sarjana adalah sebesar 3,26 persen.



#### 4.2. Persentase Melek Huruf (PMH)

Persentase Melek Huruf (PMH) atau Literacy Rate didefinisikan sebagai perbandingan jumlah penduduk usia 10 tahun ke atas yang dapat

membaca dan menulis dengan jumlah penduduk usia 10 tahun ke atas. Biasanya angka PMH ini dinyatakan dalam persen. Indikator ini berguna untuk menggambarkan mutu sumber daya manusia yang diukur dalam aspek pendidikan. Semakin tinggi nilai indikator ini, semakin tinggi mutu sumber daya manusia.

Angka Persentase Melek Huruf di Kabupaten Lebong pada tahun 2008 adalah sebesar 95,19 persen. Nilai ini dapat dikategorikan cukup baik, karena sudah melewati nilai 90 persen. Dapat diartikan bahwa dari keseluruhan penduduk Kabupaten Lebong yang berumur 10 tahun ke atas, sebagian besar sudah dapat membaca dan menulis dan hanya sebagian kecil saja penduduk berumur 10 tahun ke atas yang buta huruf. Secara tidak langsung hal ini juga mengindikasikan bahwa berdasarkan kemampuan membaca dan menulis penduduk Kabupaten Lebong berumur 10 tahun ke atas, maka kualitas pendidikan penduduk Kabupaten Lebong sudah cukup baik.

### **4.3. Rasio Murid-Guru (RMG)**

Rasio Murid-Guru (RMG) atau *Pupil Teacher Ratio* merupakan perbandingan antara jumlah murid pada suatu jenjang sekolah dengan jumlah guru pada jenjang sekolah yang bersangkutan. Indikator ini berguna untuk menggambarkan beban kerja guru dalam mengajar. Indikator ini juga dapat digunakan untuk melihat tingkat mutu pengajaran di kelas karena

semakin tinggi nilai rasio ini berarti semakin kurang tingkat pengawasan atau perhatian guru terhadap murid sehingga mutu pengajaran cenderung semakin rendah.

Perkembangan fasilitas pendidikan selama tahun 2007 dan 2008 di Kabupaten Lebong dapat terlihat dari nilai Rasio Murid-Guru. Berdasarkan data dari Dinas Pendidikan Nasional, Pemuda dan Olahraga pada tahun 2007 dan 2008 Rasio Murid-Guru pada jenjang pendidikan SD di Kabupaten Lebong mengalami kenaikan, dimana pada tahun 2007 seorang guru mengawasi sekitar 16 murid, sedangkan pada tahun 2008 menjadi sekitar 17 orang murid. Sedangkan Rasio Murid-Guru pada jenjang pendidikan SLTP dari tahun 2007 ke tahun 2008 tidak mengalami perubahan yaitu sekitar 14 orang murid per guru. Artinya kualitas proses belajar mengajar di SD diprediksi mengalami penurunan dengan rasio 17 murid satu guru dan kualitas proses belajar mengajar di SLTP tidak mengalami perubahan yang signifikan dengan rasio 14 murid satu guru jika dibandingkan dengan rasio tahun sebelumnya. Tetapi apabila kenaikan rasio diartikan sebagai kenaikan jumlah siswa, maka perlu dianalisis lebih dalam apakah jumlah kelompok anak usia SD yang mengalami kenaikan karena seiring dengan kenaikan fertilitas, ataukah disebabkan karena munculnya masalah kurangnya tenaga pengajar di Kabupaten Lebong.

Sementara itu Rasio Murid-Guru pada jenjang pendidikan SLTA juga mengalami peningkatan dari sekitar 9 orang murid per guru pada tahun

2007 menjadi 16 orang murid per guru pada tahun 2008. Artinya kualitas proses belajar mengajar di SLTA pada tahun 2008 diprediksi mengalami kemunduran dibanding tahun sebelumnya. Angka ini juga bisa memberikan interpretasi seperti di atas karena penurunan rasio disebabkan penambahan jumlah siswa dengan dibarengi oleh penurunan jumlah guru. Pengurangan jumlah guru yang cukup banyak ini perlu mendapatkan perhatian yang cukup serius dari pihak terkait, dikarenakan hal ini dapat merupakan salah satu faktor yang dapat menurunkan kualitas pendidikan secara simultan di Kabupaten Lebong. Hal ini juga tidak sejalan dengan konsep pembangunan yang berorientasi pada kesejahteraan masyarakat dengan salah satu pilar yang paling penting di sektor pendidikan.

#### **4.4. Rasio Murid-Sekolah (RMS)**

Rasio Murid-Sekolah menggambarkan kepadatan murid dalam suatu sekolah. Selain tersedianya jumlah guru dengan rasio yang ideal, keberhasilan belajar mengajar juga dipengaruhi kepadatan murid dalam suatu sekolah. Sekolah dengan jumlah murid yang tidak terlalu padat menciptakan suasana belajar yang relatif tenang, tertib dan lancar. Pada tahun 2008 Rasio Murid-Sekolah di Kabupaten Lebong untuk tingkat SD adalah sebesar 126 orang murid dalam satu sekolah. Sementara itu pada jenjang pendidikan SLTP adalah sebesar 155 orang murid dalam satu

sekolah. Pada jenjang pendidikan SLTA, rasio murid-sekolah adalah sebesar 262 orang murid dalam satu sekolah.

Dari nilai-nilai tersebut terlihat bahwa semakin tinggi jenjang pendidikan, maka semakin padat jumlah murid dalam satu sekolah. Hal ini kemungkinan disebabkan oleh semakin tinggi jenjang pendidikan, semakin minim juga jumlah sekolah yang menyebabkan semakin sedikitnya daya tampung sekolah tersebut. Secara umum dapat disimpulkan bahwa kualitas belajar mengajar di tingkat SD berkesempatan untuk lebih baik karena Rasio Murid-Sekolah yang relatif lebih kecil dibandingkan tingkat SLTP dan SLTA.

#### **4.5. Partisipasi Sekolah**

Partisipasi bersekolah menunjukkan banyaknya penduduk usia sekolah yang sedang mengikuti pendidikan, tidak pernah bersekolah ataupun tidak bersekolah lagi. Penduduk usia sekolah di sini terbagi menjadi penduduk yang berumur 7-12 tahun atau setingkat SD/ sederajat, penduduk berusia 13-15 tahun atau setingkat SMP/ sederajat, penduduk berusia 16-18 tahun atau setingkat SMA/ sederajat dan penduduk yang berusia 19-24 tahun atau setingkat perguruan tinggi.

Pada penduduk yang berusia 7-12 tahun diperoleh data bahwa 0,93 persen tidak/belum pernah bersekolah, sebanyak 98,46 persen masih bersekolah dan sebanyak 0,61 persen tidak bersekolah lagi. Pada penduduk

berusia 13-15 tahun diketahui bahwa penduduk yang berstatus tidak/belum pernah bersekolah persentasenya sangat kecil yaitu hanya 0,72 persen, selanjutnya sekitar 88,63 persen masih bersekolah dan sekitar 10,65 persen tidak bersekolah lagi.

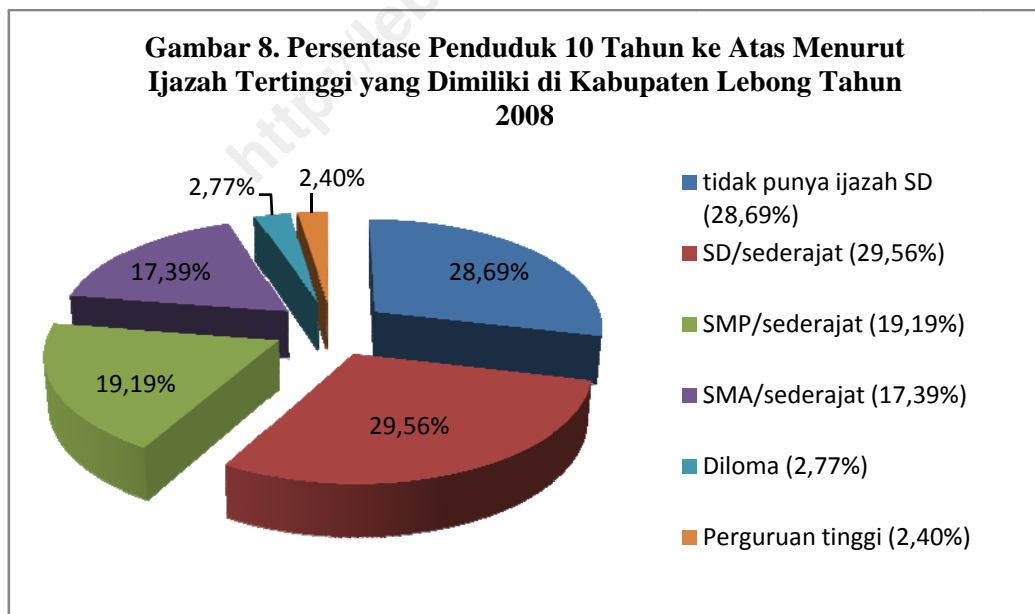
Pada kelompok umur ketiga yaitu penduduk yang berumur 16-18 tahun diketahui bahwa penduduk yang tidak/belum pernah bersekolah persentasenya sangat kecil sehingga tidak terlihat pada sampel, sebanyak 61,30 persen masih bersekolah dan sekitar 38,70 persen tidak bersekolah lagi. Kelompok umur terakhir yaitu penduduk usia 19-24 tahun, banyaknya penduduk yang tidak bersekolah lagi menunjukkan nilai terbesar yaitu mencapai 90,64 persen, penduduk yang masih bersekolah sebesar 8,98 persen dan persentase penduduk yang tidak/belum pernah bersekolah adalah sangat kecil yaitu hanya 0,38 persen.

Dari data persentase penduduk berdasarkan kelompok umur dan partisipasi sekolah tersebut terlihat bahwa semakin tinggi usia penduduk, maka angka persentase penduduk yang masih bersekolah semakin kecil. Hal ini dapat menunjukkan bahwa semakin tinggi pendidikan akan semakin banyak penduduk yang memutuskan untuk berhenti bersekolah.

#### **4.6. Ijazah Tertinggi**

Gambar 8 menyajikan data hasil Susenas Kor Tahun 2008 yang menunjukkan persentase penduduk berumur 10 tahun ke atas berdasarkan

ijazah tertinggi yang dimiliki. Dari gambar tersebut terlihat bahwa penduduk yang memiliki ijazah Sekolah Dasar (SD) adalah yang paling banyak jumlahnya yaitu sebesar 29,56 persen. Sedangkan kelompok penduduk dengan persentase paling kecil adalah pada mereka yang memiliki ijazah perguruan tinggi yaitu sebesar 2,40 persen. Sementara itu untuk kelompok yang tidak memiliki ijazah yaitu sebesar 28,69 persen, penduduk yang memiliki ijazah SMP/ sederajat yaitu sebesar 19,19 persen, penduduk yang memiliki ijazah SMA/ sederajat sebesar 17,39 persen dan kelompok penduduk dengan ijazah Diploma adalah sebesar 2,77 persen. Dari data keseluruhan terlihat bahwa ada kecenderungan semakin tinggi ijazah yang dimiliki maka persentasenya akan menjadi semakin kecil.





<http://lebonkab.bps.go.id>

# BAB V

# KETENAGAKERJAAN

## **BAB V**

### **KETENAGAKERJAAN**

Ketenagakerjaan merupakan salah satu aspek penting dalam kehidupan, yang tidak hanya untuk mencapai kepentingan individu, tetapi juga untuk memenuhi perekonomian rumah tangga dan kesejahteraan seluruh masyarakat. Selain itu ketenagakerjaan juga dapat dijadikan sebagai barometer keberhasilan pembangunan di bidang ekonomi maupun bidang kesejahteraan rakyat.

Pertumbuhan ekonomi diharapkan mampu menciptakan lapangan pekerjaan baru sehingga adapat mengurangi pengangguran. Namun dalam kenyataannya pertumbuhan ekonomi tidak selalu menciptakan lapangan pekerjaan baru sesuai dengan yang diharapkan. Hal tersebut antara lain disebabkan oleh peningkatan jumlah tenaga kerja

#### **5.1. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)**

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) adalah perbandingan antara jumlah angkatan kerja (bekerja dan pengangguran) dengan jumlah penduduk usia kerja dan biasanya dinyatakan dalam persentase. TPAK mencerminkan penduduk yang siap masuk dalam pasar kerja atau menggambarkan tingkat penyediaan (*supply*) tenaga kerja di suatu daerah. Selain itu TPAK juga berguna untuk mengindikasikan besarnya penduduk

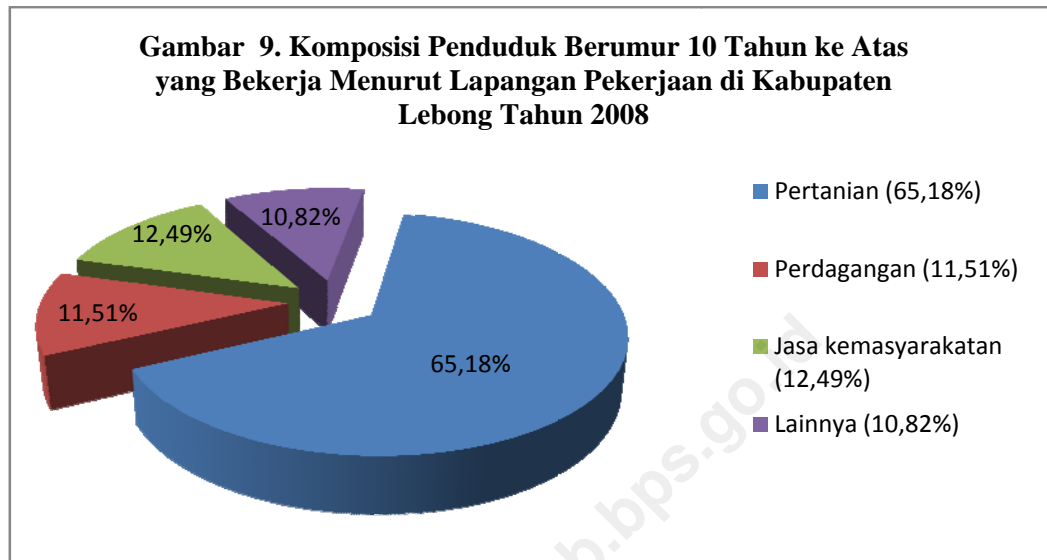
usia kerja (15 tahun ke atas) yang aktif secara ekonomi di suatu negara atau wilayah dan juga menunjukkan besaran relatif dari pasokan tenaga kerja (labour supply) yang tersedia untuk produksi barang-barang dan jasa dalam suatu perekonomian. Semakin tinggi nilai TPAK maka penyediaan tenaga kerja semakin tinggi. TPAK dipengaruhi oleh banyak faktor diantaranya penduduk yang bersekolah, penduduk yang mengurus rumah tangga, tingkat upah, tingkat pendidikan, dll.

Pada tahun 2008 TPAK Kabupaten Lebong nilainya mencapai angka 74,18 persen. Hal ini berarti dari sekitar 100 orang penduduk usia kerja, sekitar 74,18 persennya merupakan penduduk yang merupakan angkatan kerja. Sedangkan sisanya atau sekitar 25,82 persen merupakan penduduk yang bukan merupakan angkatan kerja, yaitu mereka yang melakukan kegiatan bersekolah, mengurus rumah tangga ataupun lainnya. Dari angka tersebut terlihat bahwa tingkat partisipasi penduduk usia kerja terhadap dunia kerja di Kabupaten Lebong pada tahun 2008 cukup tinggi. Berarti juga tingkat penyediaan tenaga kerja di Kabupaten Lebong pada tahun 2008 juga cukup tinggi.

## **5.2. Komposisi Penduduk yang Bekerja Menurut Lapangan Usaha**

Kesempatan kerja atau penyerapan tenaga kerja adalah banyaknya tenaga kerja yang terserap dalam pasar kerja atau bekerja. Sedangkan

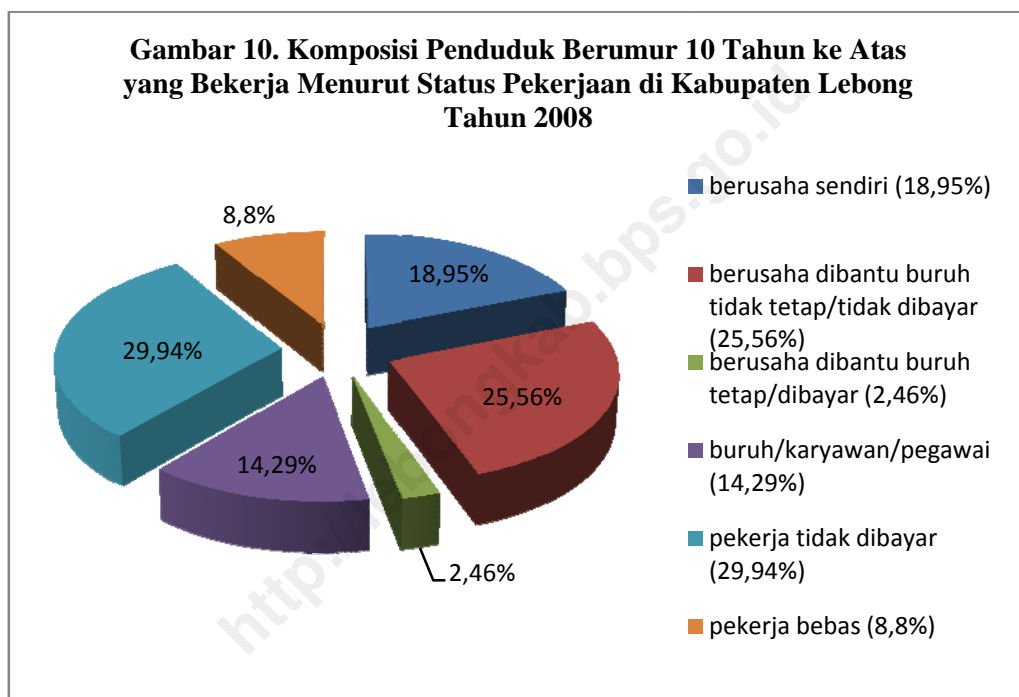
tingkat kesempatan kerja adalah perbandingan antara jumlah penduduk yang bekerja dengan jumlah angkatan kerja.



Berdasarkan lapangan usahanya, penduduk yang bekerja di Kabupaten Lebong tahun 2008 umumnya terserap di sektor pertanian. Hal ini relevan dengan kondisi geografis Kabupaten Lebong yang masih banyak memiliki lahan pertanian dan sebagian besar perekonomian penduduknya bertumpu pada sektor pertanian. Pada gambar di atas tampak bahwa proporsi pekerja yang terserap di sektor pertanian mencapai 65,18 persen. Sektor ini meliputi bidang pertanian dan perikanan. Sementara pekerja yang terserap pada sektor lainnya relatif lebih kecil nilainya. Pada sektor perdagangan yang meliputi bidang perdagangan dan akomodasi proporsi pekerja yang terserap hanya sebesar 11,51 persen. Pada sektor jasa kemasyarakatan dan administrasi, proporsi pekerja yang terserap adalah

sebesar 12,49 persen. Dan yang terakhir adalah sektor lainnya yang terdiri atas bidang pertambangan, industri, konstruksi, transportasi dan bidang lainnya proporsi pekerja yang terserap adalah paling kecil dengan persentase 10,82 persen.

### 5.3. Komposisi Penduduk yang Bekerja Menurut Status Pekerjaan



Ditinjau dari statusnya, penduduk yang bekerja di Kabupaten Lebong sebagian besar adalah pekerja tidak dibayar atau pekerja keluarga dan berusaha dengan dibantu buruh tidak tetap atau buruh tidak dibayar. Pada gambar 11 tampak bahwa proporsi pekerja tidak dibayar pada tahun 2008 di Kabupaten Lebong mencapai sebesar 29,94 persen, sedangkan proporsi penduduk yang berusaha dengan dibantu buruh tidak tetap atau

tidak dibayar adalah sebesar 25,56 persen. Sementara itu proporsi pekerja yang bekerja dengan status berusaha sendiri, berusaha dibantu pekerja tetap/pekerja dibayar, buruh/karyawan/pegawai dan pekerja bebas masing-masing adalah sebesar 18,95 persen, 2,46 persen, 14,29 persen dan 8,8 persen.

<http://lebongkab.bps.go.id>

# BAB VI

## SOSIAL LAINNYA

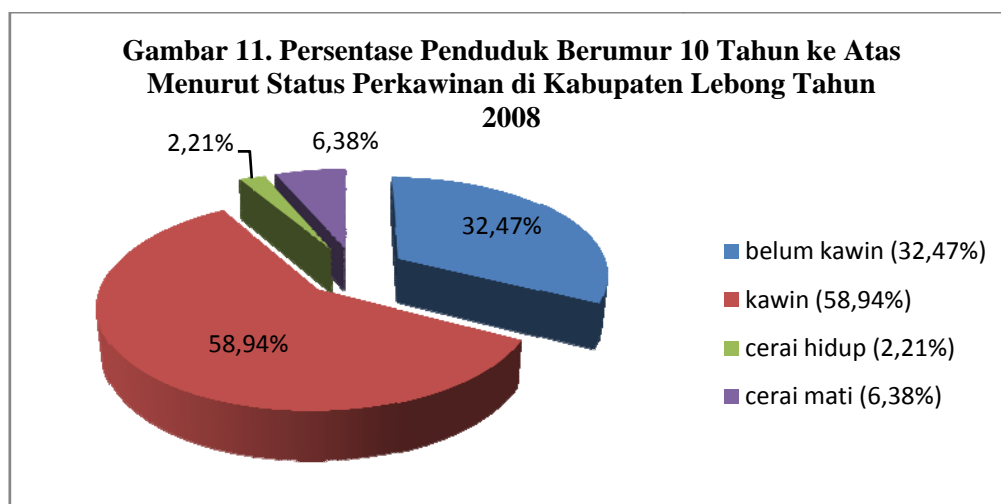
## BAB VI

### SOSIAL LAINNYA

#### 6.1. Status Perkawinan

Gambaran mengenai status perkawinan penduduk Kabupaten Lebong yang berumur 10 tahun ke atas pada tahun 2008 dapat dilihat pada gambar di bawah ini. Status perkawinan yang dianalisis di sini terbagi menjadi empat kelompok yaitu belum kawin, kawin, cerai hidup dan cerai mati.

Proporsi paling besar dari penduduk berumur 10 tahun ke atas di Kabupaten Lebong tahun 2008 adalah penduduk dengan status kawin, yaitu sebesar 58,94 persen. Sedangkan penduduk dengan status belum kawin adalah 32,47 persen. Penduduk dengan status cerai hidup sebesar 2,21 persen dan penduduk dengan status cerai mati adalah 6,38 persen.



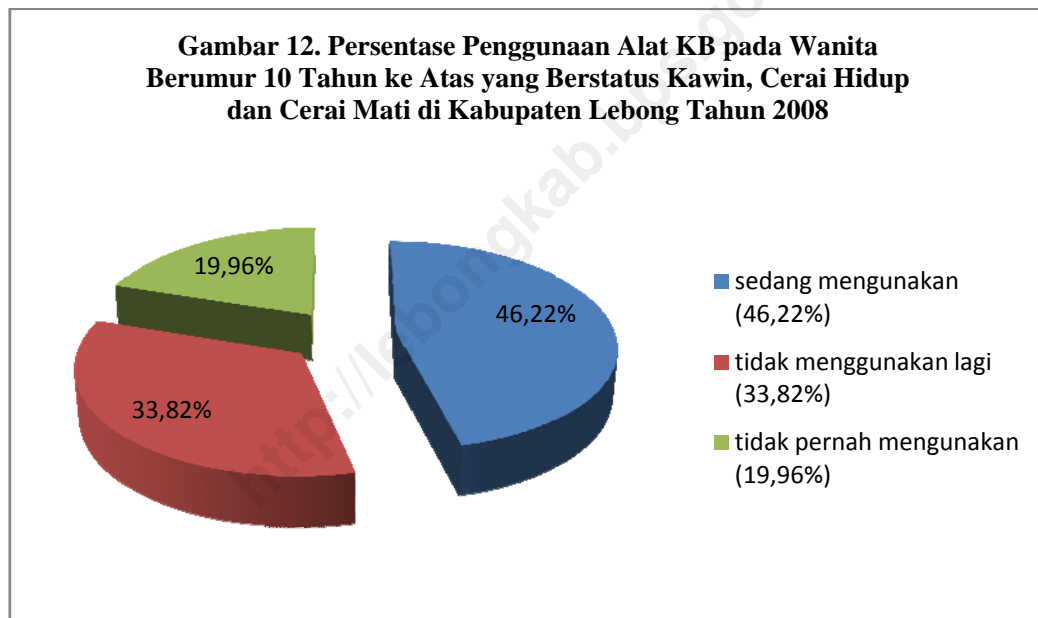


Dari data penduduk dengan status belum kawin, persentase penduduk laki-laki yang belum kawin lebih tinggi dibanding penduduk perempuan, yaitu sebesar 36,16 persen, sedangkan persentase penduduk perempuan yang belum kawin yaitu 28,81 persen. Dari data tersebut dapat disimpulkan bahwa dalam masyarakat Kabupaten Lebong, khususnya penduduk laki-laki cenderung untuk menunda perkawinan dibanding perempuan.

Dari status penduduk yang kawin, penduduk perempuan yang berstatus kawin kembali lebih rendah daripada penduduk laki-laki. Persentase penduduk laki-laki yang berstatus kawin adalah sebesar 59,20 persen. Sementara itu persentase penduduk perempuan yang berstatus kawin adalah sebesar 58,68 persen. Sementara itu pada penduduk yang berstatus cerai hidup dan cerai mati persentase penduduk perempuan adalah lebih besar dibanding penduduk laki-laki yaitu masing-masing sebesar 2,84 persen dan 9,68 persen untuk penduduk perempuan dan masing-masing sebesar 1,58 persen dan 3,05 persen untuk penduduk laki-laki. Hal ini disebabkan karena laki-laki cenderung lebih cepat menikah lagi setelah mengalami perceraian atau ditinggal mati istrinya. Ini juga menggambarkan norma atau nilai seksualitas yang masih kental di dalam masyarakat yang masih menganut tabu terhadap perempuan yang segera menikah setelah menjadi janda. Ada tuntutan terhadap perempuan untuk mematuhi norma-norma tidak tertulis yang berlaku di masyarakat.

## 6.2. Penggunaan/ Pemakaian Alat/ Cara KB

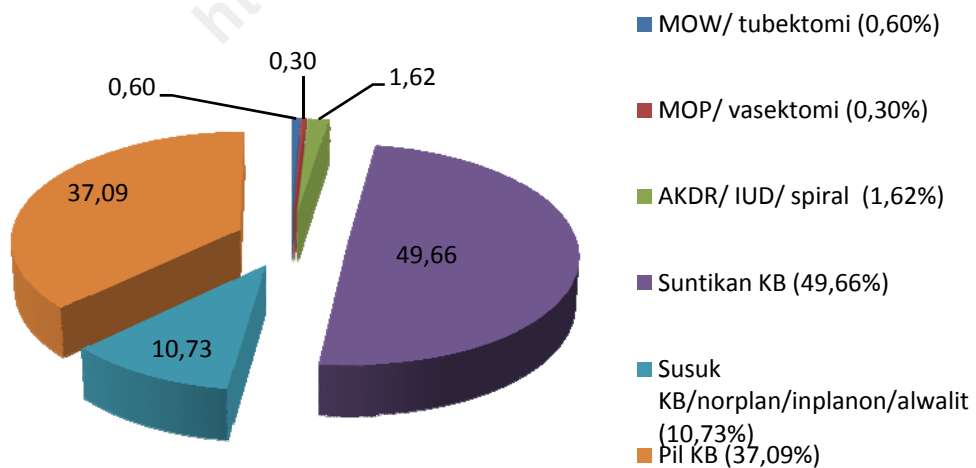
Program Keluarga Berencana (KB) merupakan salah satu program pemerintah yang paling utama untuk mengontrol laju pertumbuhan penduduk. Pemakaian kontrasepsi banyak digunakan untuk menilai keberhasilan program KB. Lebih jauh lagi pada akhirnya nanti akan dapat digunakan untuk memperkirakan penurunan angka fertilitas sebagai akibat dari pemakaian kontrasepsi.



Gambar di atas menunjukkan persentase penggunaan alat KB pada wanita berumur 10 tahun ke atas yang berstatus kawin, cerai hidup dan cerai mati di Kabupaten Lebong Tahun 2008 menurut data Susenas Kor Tahun 2008. Terlihat bahwa wanita yang sedang menggunakan alat KB adalah paling banyak diantara dua kategori lainnya yaitu sebesar 46,22

persen. Sementara itu persentase wanita yang tidak menggunakan lagi alat KB adalah sebesar 33,82 persen dan persentase wanita yang tidak pernah menggunakan alat KB sama sekali adalah 19,96 persen. Hal ini mengindikasikan bahwa di Kabupaten Lebong kesadaran wanita untuk menggunakan alat KB sudah cukup baik. Dari data terlihat bahwa persentase wanita yang sama sekali belum pernah menggunakan alat KB adalah paling sedikit. Hal ini bisa jadi disebabkan faktor kurangnya pengetahuan, umur responden, keinginan memiliki keturunan pada pasangan muda dan adat istiadat serta kepercayaan agama. Akan tetapi pembahasan yang lebih lanjut akan membutuhkan data yang lebih detail.

**Gambar 13. Persentase Wanita Berumur 10 Tahun ke Atas Berstatus Kawin, Cerai Hidup dan Cerai Mati yang Sedang Menggunakan Alat/ Cara KB di Kabupaten Lebong Tahun 2008**



Jika dihubungkan dengan jenis alat/ cara KB yang digunakan, maka dari jumlah wanita yang sedang menggunakan alat/ cara KB tersebut persentase paling banyak adalah penggunaan alat KB jenis suntik yaitu sebesar 49,66 persen, selanjutnya sekitar 37,09 persen menggunakan pil KB. Kedua jenis alat KB ini memang sangat populer di masyarakat, jadi tidak mengherankan persentase wanita yang menggunakannya juga lebih besar. Jenis alat/ cara KB lain kurang masih kurang populer di masyarakat kita, hal tersebut ditunjukkan oleh nilai persentasenya yang kecil untuk jenis lainnya.

### **6.3. Indeks Pembangunan Manusia**

UNDP menggunakan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) atau *Human Development Index (HDI)* untuk mengukur tingkat kinerja suatu negara dalam bidang pembangunan manusia. Secara lebih luas IPM telah digunakan pemerintah pusat untuk mengukur kinerja pemerintah provinsi dan kabupaten/kota dalam bidang pembangunan manusia. Acuan keberhasilan pembangunan manusia di suatu negara menurut UNDP adalah apabila penduduknya paling tidak memiliki peluang umur panjang dan sehat, pengetahuan dan keterampilan yang memadai dan peluang untuk merealisasikan pengetahuan dan keterampilan yang memadai dan peluang untuk merealisasikan pengetahuan dan keterampilan yang dimiliki dalam kegiatan yang produktif. Unsur yang terakhir ini menggambarkan

kesempatan penduduk untuk bekerja dan memperoleh uang sehingga memiliki kemampuan daya beli.

IPM adalah indeks komposit yang terdiri dari 3 indeks, yaitu Angka Harapan Hidup (*life expectancy at age*), Angka Melek Huruf penduduk dewasa (*adult literacy rate*) dan Rata-rata Lama Sekolah (*mean years of schooling*) dan Paritas Daya Beli (*purchasing power parity*). Agar dapat dibandingkan antar negara, propinsi, dan kabupaten/kota komponen Paritas Daya Beli yang digunakan yaitu Produk Domestik Bruto (PDB) dan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) riil perkapita yang telah disesuaikan. Kinerja pembangunan manusia di suatu negara, propinsi, dan kabupaten/kota dikatakan semakin baik bila nilai IPM-nya semakin mendekati angka 100.

Pada kurun waktu 2007 sampai 2008 nilai IPM Kabupaten Lebong mengalami peningkatan. Pada tahun 2007 nilai IPM Kabupaten Lebong sebesar 68,38 kemudian meningkat menjadi 69,08 pada tahun 2008. Angka IPM tersebut merupakan peringkat ke-6 untuk tingkat kabupaten se-Propinsi Bengkulu.

Peningkatan IPM Kabupaten Lebong pada kurun waktu 2007 sampai dengan tahun 2008 disebabkan oleh peningkatan sebagian besar komponen penghitungan IPM Kabupaten Lebong. Dalam kurun waktu dua tahun tersebut Angka Harapan Hidup (AHH) penduduk Lebong mengalami peningkatan dari rata-rata 65,55 tahun menjadi 65,87 tahun. Selanjutnya

komponen Rata-rata Lama Sekolah atau *Mean Years of Schooling (MYS)* tidak mengalami perubahan dari tahun 2007 sampai tahun 2008 yaitu sebesar 7,47 tahun. Demikian juga dengan nilai Paritas Daya Beli atau Konsumsi Riil Perkapita yang menunjukkan tingkat kemampuan ekonomi rumah tangga yang mengalami peningkatan yaitu sebesar 610,88 ribu rupiah/kapita/tahun pada tahun 2007 menjadi 615,56 ribu rupiah/kapita/tahun pada tahun 2008. Sedangkan untuk komponen Angka Melek Huruf (AMH) Kabupaten Lebong nilainya meningkat selama tahun 2006 sampai 2007 yaitu sebesar 94,49 persen menjadi 95,19 persen. Peningkatan sebagian besar komponen penghitungan IPM tersebut membuktikan bahwa upaya yang dilakukan pemerintah daerah dalam meningkatkan kesejahteraan penduduk di Kabupaten Lebong yang meliputi bidang kesehatan, pendidikan, ketenagakerjaan dan ekonomi pada kurun waktu 2007 sampai dengan tahun 2008 cukup berhasil.

TABEL - TABEL

<http://lebongkap.bps.go.id>

**Tabel 2.1. Luas Wilayah Menurut Kecamatan di Kabupaten Lebong Tahun 2008**

Kecamatan (1)	Luas	
	Ha (2)	Persentase (3)
Lebong Selatan	29.856	15,47
Rimbo Pengadang	45.952	23,82
Lebong Tengah	17.840	9,25
Lebong Utara	90.580	46,95
Lebong Atas	8.696	4,51
Padang Bano*)	-	-
<b>Jumlah</b>	<b>192.924</b>	<b>100,00</b>

\*) Termasuk dalam Lebong Atas

Sumber: Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Lebong



**Tabel 2.2. Jumlah Penduduk Menurut Kecamatan di Kabupaten Lebong Tahun 2007**

No	Kecamatan	Jumlah Penduduk
(1)	(2)	(3)
1	Lebong Selatan	23.018
2	Rimbo Pengadang	10.352
3	Lebong Tengah	17.369
4	Lebong Utara	29.356
5	Lebong Atas	9.595
6	Padang Bano*)	-
Kabupaten Lebong		89.690

\*) Termasuk dalam Lebong Atas

Sumber: BPS Kabupaten Lebong

Data tahun 2008 tidak tersedia

**Tabel 2.3. Jumlah Penduduk, Luas Daerah dan Kepadatan Penduduk di Kabupaten Lebong Tahun 2007-2008**

Jumlah Penduduk	Luas Daerah (Km <sup>2</sup> )	Kepadatan Penduduk
(1)	(2)	(3)
89.690	1.929,24	46
91.142	1.929,24	47

Sumber: BPS Kabupaten Lebong

**Tabel 2.4. Persentase Penduduk Menurut Jenis Kelamin dan Kelompok Umur di Kabupaten Lebong Tahun 2008**

No	Jenis Kelamin	2008		
		0 - 14	15 - 64	65 +
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Laki-laki	29,03	65,93	5,04
2	Perempuan	27,92	66,51	5,57
Kabupaten Lebong		28,48	66,21	5,31

Sumber: Diolah dari Data Susenas BPS Kabupaten Lebong

**Tabel 2.5. Angka Beban Tanggungan Penduduk Menurut Jenis Kelamin dan Kelompok Umur di Kabupaten Lebong Tahun 2008**

No	Jenis Kelamin	Kelompok Umur		
		DR	YDR	ODR
1	2	3	4	5
1	Laki-laki	51,68	44,03	7,65
2	Perempuan	50,36	41,98	8,38
Kabupaten Lebong		51,03	43,01	8,01

Sumber: Diolah dari Data Susenas BPS Kabupaten Lebong

**Tabel 2.6. Persentase Penduduk Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin di Kabupaten Lebong Juni 2008**

No	Kelompok Umur	Jenis Kelamin	
		Laki-laki	Perempuan
		(3)	(4)
(1)	(2)	(3)	(4)
1	0 – 4	8,90	8,49
2	5 – 9	10,57	8,69
3	10 – 14	9,56	10,74
4	15 – 19	9,92	9,93
5	20 – 24	9,47	8,26
6	25 – 29	8,43	9,01
7	30 – 34	7,14	8,72
8	35 – 39	7,96	6,19
9	40 – 44	5,96	6,44
10	45 – 49	5,72	7,73
11	50 – 54	5,85	3,98
12	55 – 59	3,30	3,33
13	60 – 64	2,18	2,91
14	65 +	5,04	5,57
Jumlah		100,00	100,00

Sumber: Diolah dari Data Susenas BPS Kabupaten Lebong

**Tabel 3.1. Jumlah Puskesmas Menurut Jenis dan Kecamatan di Kabupaten Lebong Tahun 2008**

Kecamatan	Jenis Puskesmas			
	Puskesmas	Puskesmas RRI	PUSTU	Puskesmas Keliling
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Rimbo Pengadang	2	-	3	2
Lebong Selatan	3	-	6	3
Lebong Tengah	2	-	4	2
Lebong Utara	3	-	11	4
Lebong Atas	1	-	7	1
Padang Bano	-	-	-	-
<b>Jumlah</b>	<b>11</b>	<b>-</b>	<b>31</b>	<b>12</b>

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Lebong

**Tabel 3.2. Persentase Balita Menurut Penolong Kelahiran Pertama dan Terakhir di Kabupaten Lebong Tahun 2008**

Penolong kelahiran	Pertama	Terakhir
1	2	3
Dokter	4,00	6,18
Bidan	61,13	60,78
Tenaga Paramedis Lainnya	0,47	0,93
Dukun bersalin	33,47	31,18
Famili/keluarga	0,93	0,93
<b>Jumlah</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>

Sumber: Diolah dari data Susenas BPS Kabupaten Lebong

**Tabel 3.3. Persentase Balita 2-4 Tahun Yang Pernah Disusui Menurut Lamanya Disusui di Kabupaten Lebong Tahun 2008**

Lamanya Disusui	Persentase
(1)	(2)
< 6 bulan	1,96
6 - 11 bulan	5,38
12 – 17 bulan	20,44
18 – 23 bulan	33,83
>= 24 bulan	38,39
<b>Jumlah</b>	<b>100,00</b>

Sumber: Diolah dari data Susenas BPS Kabupaten Lebong



**Tabel 3.4. Persentase Balita 2-4 Tahun Yang Pernah Mendapat Imunisasi Menurut Jenis Imunisasi di Kabupaten Lebong Tahun 2008**

Jenis Imunisasi	Apakah mendapat imunisasi	
	Ya	Tidak
(1)	(2)	(3)
BCG	93,57	6,43
DPT	90,02	9,98
Polio	87,26	12,74
Campak	79,67	20,33
Hepatitis B	85,10	14,90

Sumber: Diolah dari data Susenas BPS Kabupaten Lebong

**Tabel 4.1. Persentase Penduduk Berumur 10 Tahun Ke Atas Menurut Ijazah/ STTB Tertinggi yang Dimiliki dan Jenis Kelamin di Kabupaten Lebong Tahun 2008**

Ijazah/ STTB	Jenis Kelamin	
	Laki-laki	Perempuan
1	2	3
Tidak punya ijazah SD	26,92	30,47
SD/Sederajat	27,50	31,65
SMP/Sederajat	20,74	17,64
SMA/Sederajat	19,39	15,37
Diploma	2,90	2,63
Sarjana	2,55	2,24
Jumlah	100,00	100,00

Sumber: Diolah dari data Susenas BPS Kabupaten Lebong

**Tabel 4.2. Rasio Murid-Guru di Kabupaten Lebong Tahun 2007-2008**

Jenjang Pendidikan	Rasio Murid-Guru	
	2007	2008
(1)	(2)	(3)
SD/Sederajat	16	17
SMP/Sederajat	14	14
SMA/Sederajat	9	16

Sumber: Dinas Pendidikan Nasional Pemuda dan Olahraga Kabupaten Lebong

**Tabel 4.3. Rasio Murid-Sekolah di Kabupaten Lebong Tahun 2007-2008**

Jenjang Pendidikan	Rasio Murid-Sekolah	
	2007	2008
(1)	(2)	(3)
SD/Sederajat	123	126
SMP/Sederajat	191	155
SMA/Sederajat	234	262

Sumber: Dinas Pendidikan Nasional Pemuda dan Olahraga Kabupaten Lebong

**Tabel 4.4. Persentase Penduduk Usia Sekolah Menurut Kelompok Umur dan Partisipasi Sekolah di Kabupaten Lebong Tahun 2008**

Kelompok Umur	Partisipasi Sekolah		
	Tidak/belum pernah bersekolah	Masih bersekolah	Tidak bersekolah lagi
(1)	(2)	(3)	(4)
7 - 12 tahun	0,93	98,46	0,61
13 - 15 tahun	0,72	88,63	10,65
16 - 18 tahun	0,00	61,30	38,70
19 – 24 tahun	0,38	8,98	90,64

Sumber: Diolah dari data Susenas BPS Kabupaten Lebong

**Tabel 4.5. Persentase Penduduk Umur 10 Tahun Ke Atas Menurut Tingkat Pendidikan yang Ditamatkan dan Klasifikasi Daerah di Kabupaten Lebong Tahun 2008**

Jenjang Pendidikan	Klasifikasi daerah		Total
	Pedesaan	Perkotaan	
(1)	(2)	(3)	(4)
Tidak punya ijazah	22,11	30,04	28,69
SD sederajat	19,60	31,62	29,56
SLTP sederajat	18,57	19,32	19,20
SLTA sederajat	28,66	15,06	17,39
Diploma	7,03	1,89	2,77
Perguruan tinggi	4,03	2,06	2,40
<b>Jumlah</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>

Sumber: Diolah dari data Susenas BPS Kabupaten Lebong

**Tabel 6.1. Persentase Penduduk Berumur 10 Tahun Ke Atas Menurut Status Perkawinan dan Jenis Kelamin di Kabupaten Lebong Tahun 2008**

Status Perkawinan	Jenis Kelamin		Laki-laki + Perempuan
	Laki-laki	Perempuan	
(1)	(2)	(3)	(4)
Belum kawin	36,17	28,81	32,47
Kawin	59,20	58,67	58,94
Cerai Hidup	1,58	2,84	2,21
Cerai Mati	3,05	9,68	6,38
Jumlah	100,00	100,00	100,00

Sumber: Diolah dari Data Susenas BPS Kabupaten Lebong